NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan
Volume 7, Issue 3, August 2026
DOI: https://doi.org/10.55681/nusra.v7i3.6321
Homepage: ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/nusra

p-ISSN: 2715-114X
e-ISSN: 2723-4649
pp. 1327-1342

REINTERPRETASI NILAI ADAB DAN ETIKA KITAB TA'LIM AL-MUTA'ALLIM TERHADAP FENOMENA FEODALISME DALAM PENDIDIKAN PESANTREN

Yoga Mahath Pandika[1], Zaini Fasya[2]
Program Studi Magister Pendidikan agama islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia[1], Pendidikan Agama Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia[2]
**Corresponding author email: hathyoga23@gmail.com*

Article History

Received: 7 May 2026
Revised: 12 June 2026
Published: 18 June 2026

ABSTRACT

This article aims to reinterpret the concept of adab in Ta'lim al-Muta'allim by Burhān al-Dīn al-Zarnūjī in order to clearly distinguish between the ethical values of Islamic education and practices of symbolic feudalism within pesantren education. This study employs a qualitative approach through a literature review of classical texts, Islamic educational studies, and sociological literature on education. The analysis is conducted through a normative reading of the concept of adab in Ta'lim al-Muta'allim, combined with a critical interpretation of contemporary pesantren educational practices. The findings indicate that adab in al-Zarnūjī's thought constitutes a pedagogical ethic that regulates learning orientation, evidentially grounded rationality, ethical relations between teachers and students, self-discipline, and the formation of a conducive educational social environment. The concept of adab is not intended to negate critical reasoning, but rather to cultivate intellectual and moral responsibility among seekers of knowledge. Feudalism in pesantren education is understood as a sociological ph,enomenon arising from charismatic authority structures and symbolic domination, rather than as a direct consequence of normative Islamic teachings. The distortion of adab emerges when its ethical values are reduced to absolute obedience without space for dialogue and critical reflection. Reinterpreting adab as an emancipatory ethic is therefore essential to restoring the function of pesantren education as a space for forming knowledgeable, ethical, critical, and morally responsible individuals.

Keywords: *adab, ethics, feudalism, pesantren, Ta'lim al-Muta'allim*

Copyright © 2026, The Author(s).

How to cite: Pandika, Y.M. & Fasya,Z. (2026). EINTERPRETASI NILAI ADAB DAN ETIKA KITAB TA'LIM AL-MUTA'ALLIM TERHADAP FENOMENA FEODALISME DALAM PENDIDIKAN PESANTREN. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, *7* (3), 1327–1342. https://doi.org/10.55681/nusra.v7i2.6321

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

LATAR BELAKANG

Pembahasan publik mengenai pendidikan pesantren di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan meningkatnya kritik terhadap relasi kuasa yang dinilai bersifat hierarkis dan feodal. Berbagai perbincangan akademik, pemberitaan media, serta wacana di ruang digital memperlihatkan adanya keresahan terkait praktik kepatuhan mutlak, pembatasan ruang dialog, dan reduksi sikap kritis santri dalam proses Pendidikan (Winarno, 2025 ; Wahid, 2025 ; Alfaris, 2025). Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian relasi pedagogis pesantren dengan prinsip etika pendidikan Islam, terutama ketika otoritas pendidik dipersepsikan melampaui batas pedagogis dan moral.

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembentukan tradisi keilmuan, spiritualitas, dan moralitas umat Islam (Jamil, 2023). Karakteristik utama pesantren terletak pada integrasi antara transmisi ilmu pengetahuan (*ta'līm*), pembentukan kepribadian (*tarbiyah*), dan internalisasi nilai etika (*adab*) (Mukhlis, 2023). Sistem pendidikan pesantren tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga menempatkan dimensi moral dan spiritual sebagai fondasi utama proses pembelajaran. Relasi antara kyai dan santri terbentuk tidak semata-mata dalam kerangka pedagogis formal, melainkan juga mengandung makna simbolik, kultural, dan spiritual yang kuat (Afriyal, 2025)

Ta'lim al-Muta'allim karya Burhān al-Dīn al-Zarnūjī merupakan salah satu teks klasik yang memiliki pengaruh dalam pembentukan etos pendidikan Islam tradisional di Indonesia. Kitab ini diajarkan secara luas di pesantren sebagai rujukan etika menuntut ilmu (Manan, 2025). Al-Zarnūjī menekankan pentingnya adab terhadap guru, kesungguhan dalam belajar, pengendalian diri, serta kesadaran spiritual sebagai prasyarat keberhasilan pendidikan. Konsep adab dalam kitab ini tidak dipahami sebatas tata krama lahiriah, melainkan sebagai fondasi moral dan epistemologis yang mengarahkan proses pencarian ilmu agar berlangsung secara benar dan bertanggung jawab.

Perkembangan pendidikan pesantren dalam konteks kontemporer memunculkan problem interpretatif ketika nilai adab dipraktikkan dalam relasi yang cenderung hierarkis. Feodalisme dalam konteks pendidikan pesantren dipahami sebagai pola relasi sosial yang menempatkan otoritas kyai secara absolut, menuntut kepatuhan tanpa ruang dialog, serta membatasi ekspresi sikap kritis santri (Ashimulloh, 2025). Pola relasi tersebut melahirkan ambiguitas antara etika penghormatan kepada guru dan praktik dominasi simbolik. Ambiguitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai posisi adab dalam pendidikan pesantren, khususnya terkait kemungkinan keterkaitan antara ajaran adab dalam *Ta'lim al-Muta'allim* dan praktik feodalisme dalam kehidupan pesantren.

Kajian tentang pesantren menunjukkan bahwa kyai memiliki peran sentral tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai figur utama dalam struktur sosial dan kultural pesantren. Zamakhsyari Dhofier menjelaskan bahwa otoritas kyai bersifat karismatik dan memperoleh pengakuan luas dari santri serta masyarakat (Dhofier, 1980). Otoritas tersebut diperkuat oleh simbol-simbol religius, tradisi kepatuhan, dan

legitimasi keilmuan. Kondisi tertentu memungkinkan relasi tersebut berkembang menjadi pola dominasi simbolik yang menyerupai feodalisme ketika otoritas tidak lagi berpijak pada rasionalitas keilmuan, keteladanan moral, dan etika pedagogis.

Pemaknaan adab sebagai bentuk feodalisme merupakan penyederhanaan konseptual yang berpotensi menimbulkan kesalahan analitis. Perspektif pendidikan Islam memandang adab sebagai prinsip etis yang menempatkan relasi guru dan murid secara adil dan proporsional, bukan sebagai legitimasi kekuasaan (Fitriyanto, 2025). *Ta'lim al-Muta'allim* menempatkan penghormatan kepada guru dalam kerangka etika ilmu, sebagaimana dinyatakan dalam ungkapan yang dinisbatkan kepada Sayyidina 'Ali: **رأيتُ أحقَّ الحقِّ حقَّ المعلِّم** Ungkapan tersebut menegaskan bahwa kemuliaan guru bersumber dari peran keilmuannya dan tanggung jawab moralnya dalam proses transmisi ilmu, bukan dari otoritas struktural yang menuntut kepatuhan absolut (Az-Zarnuji, 2009). Pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas menegaskan bahwa adab berfungsi menjaga keteraturan ilmu, integritas pendidik, serta pembentukan tanggung jawab etis peserta didik, bukan sebagai instrumen dominasi simbolik (Al-Attas, 1991).

Penelitian ini bertujuan mereinterpretasi konsep adab dan etika pendidikan dalam *Ta'lim al-Muta'allim* guna membedakan secara tegas antara nilai etika pendidikan Islam dan praktik feodalisme dalam pendidikan pesantren. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman normatif konsep adab dalam *Ta'lim al-Muta'allim*, identifikasi bentuk-bentuk feodalisme dalam praktik pendidikan pesantren, serta perumusan reinterpretasi adab sebagai landasan etika pendidikan pesantren yang kritis dan dialogis. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan pemikiran pendidikan Islam serta kontribusi praktis bagi pembaruan relasi pedagogis yang lebih adil, reflektif, dan berorientasi pada pembentukan insan beradab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap makna, struktur konseptual, dan implikasi etis konsep adab dalam pendidikan Islam, bukan pada pengukuran variabel atau pengujian hipotesis kuantitatif (Akbar, 2024). Studi literatur memandang teks keagamaan dan karya akademik sebagai konstruksi normatif yang memiliki dimensi historis, filosofis, dan pedagogis, sehingga memungkinkan penafsiran yang kontekstual dan reflektif terhadap gagasan pendidikan pesantren.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa *Kitab Ta'lim al-Muta'allim* karya Burhān al-Dīn al-Zarnūjī dalam teks Arab serta terjemahan yang diakui secara akademik, yang diperlakukan sebagai rujukan normatif utama etika pendidikan Islam klasik. Data sekunder meliputi literatur klasik dan kontemporer tentang pendidikan Islam, studi pesantren, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas etika pendidikan dan budaya akademik pesantren (Darmawan, 2025).

Analisis data dilakukan melalui pembacaan normatif-tekstual terhadap *Ta'lim al-Muta'allim* untuk mengidentifikasi konsep adab, orientasi belajar, dan prinsip relasi etis guru–murid, yang dilanjutkan dengan analisis

komparatif-kontekstual antara konsep normatif tersebut dan praktik pendidikan pesantren sebagaimana direpresentasikan dalam literatur akademik. Hasil analisis kemudian ditafsirkan secara kritis menggunakan perspektif pendidikan dialogis untuk merumuskan adab sebagai etika pendidikan yang reflektif, emansipatoris, dan relevan dengan kebutuhan pedagogis pesantren kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Adab sebagai Fondasi Etika Pendidikan dalam *Ta'lim al-Muta'allim*

Analisis terhadap kitab *Ta'lim al-Muta'allim* menunjukkan bahwa konsep *adab* menempati posisi sentral sebagai fondasi etika pendidikan yang mengatur orientasi belajar, relasi pedagogis, dan disiplin diri penuntut ilmu. Al-Zarnūjī merumuskan adab bukan sebagai seperangkat tata krama lahiriah, melainkan sebagai prasyarat normatif yang menentukan keberhasilan pendidikan dan kemanfaatan ilmu (Az-Zarnuji, 2009). Kerangka ini menempatkan adab sebagai mekanisme etis yang menjaga keteraturan ilmu dan membentuk subjek pendidikan agar proses belajar tidak tereduksi menjadi transmisi pengetahuan semata, melainkan menjadi jalan pembentukan integritas moral dan tanggung jawab spiritual (Halstead, 2004).

Temuan utama dari pembacaan teks memperlihatkan bahwa adab pertama-tama diarahkan pada penataan tujuan dan orientasi belajar. Al-Zarnūjī menegaskan prinsip tersebut melalui pernyataan: **" وينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه"**, yang menuntut penuntut ilmu untuk memilih ilmu yang paling baik dan bermanfaat. Makna normatif dari kutipan ini menunjukkan bahwa pemilihan ilmu tidak bersifat netral, melainkan harus dipertimbangkan secara etis berdasarkan kemaslahatan agama dan masa depan (Sodiman, 2013) Orientasi tersebut mengafirmasi bahwa pendidikan dalam perspektif al-Zarnūjī berfungsi membimbing manusia menuju kebaikan yang terarah, bukan sekadar memperluas pengetahuan atau keterampilan teknis. Kerangka ini sejalan dengan pandangan pendidikan Islam yang menempatkan ilmu dalam hierarki tujuan hidup dan moralitas, sehingga adab berfungsi sebagai kompas normatif dalam menentukan nilai suatu pengetahuan (Setiawan, 2014).

Dimensi epistemologis adab tampak lebih jelas ketika al-Zarnūjī menekankan pentingnya rasionalitas dasar argumentatif dalam beriman dan belajar. Pernyataan **"ويقدم علم التوحيد والمعرفة ويعرف الله تعالى بالدليل"** menegaskan prioritas ilmu tauhid yang dibangun atas dalil, bukan sekadar *taqlīd*. Makna kutipan ini memperlihatkan bahwa adab tidak dimaksudkan untuk mematikan nalar kritis murid, melainkan mengarahkan daya pikir agar tunduk pada disiplin epistemik yang bertanggung jawab. Al-Zarnūjī mengakui keabsahan iman taklid secara formal, tetapi tetap memandangnya bermasalah secara etis karena mengabaikan tanggung jawab intelektual. Temuan ini memperlihatkan bahwa adab dalam *Ta'lim al-Muta'allim* mengandung dimensi reflektif yang mendorong murid untuk memahami, menimbang, dan menyadari dasar pengetahuannya, sehingga adab berfungsi sebagai etika berpengetahuan, bukan instrumen penundukan intelektual (Saihu, 2020).

Pembacaan terhadap fasal yang memperingatkan bahaya "ilmu baru" tanpa dasar juga memperkaya pemahaman tentang fungsi adab sebagai pengatur prioritas dan

perhatian belajar. Kutipan **" عليكم بالعتق وإياكم والمحدثات"** sering dipahami secara simplistis sebagai penolakan terhadap pembaruan, tetapi analisis teks menunjukkan bahwa yang dikritik al-Zarnūjī adalah pengetahuan yang terlepas dari tradisi keilmuan dan berujung pada perdebatan destruktif. Makna normatifnya mengarah pada penegasan bahwa ilmu harus memiliki legitimasi metodologis dan tujuan etis yang jelas. Ilmu debat yang menjauhkan dari fikih, menimbulkan permusuhan, dan menyia-nyiakan waktu diposisikan sebagai ancaman terhadap kualitas pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa adab berfungsi sebagai etika pengelolaan energi intelektual dan ketenangan batin murid, sehingga pendidikan diarahkan pada pendalaman dan kebermaknaan, bukan polemik tanpa kemanfaatan (Sodiman, 2013).

Analisis terhadap fasal memilih guru mengungkapkan dimensi relasional adab dalam pendidikan. Al-Zarnūjī menegaskan bahwa guru ideal adalah sosok yang *'ālim*, *wara'*, dan matang secara usia serta pengalaman, sebagaimana dinyatakan dalam uraian **"أما اختيار الأستاذ"** yang menekankan kualitas keilmuan dan moral guru. Makna normatif dari kriteria tersebut menunjukkan bahwa otoritas guru dalam pendidikan Islam tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada legitimasi etis dan kompetensi ilmiah. Kisah Abu Hanifah yang memilih Hammad bin Abi Sulaiman setelah pertimbangan yang matang memperlihatkan bahwa relasi guru murid ideal dimulai dari proses rasional dan reflektif. Temuan ini menegaskan bahwa adab dalam relasi pedagogis tidak identik dengan kepatuhan buta, melainkan dengan penghormatan yang lahir dari kesadaran akan peran dan amanah guru dalam transmisi ilmu (Samdani, 2021 ; Al Ainiyah, 2025).

Dimensi dialogis adab semakin tampak melalui penekanan al-Zarnūjī pada musyawarah. Pernyataan **" والمشاورة في الأمور كلها"** menegaskan bahwa pengambilan keputusan, termasuk dalam urusan belajar, harus dilakukan melalui konsultasi dan pertimbangan kolektif. Makna normatif kutipan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak dibangun di atas otoritarianisme sepihak, melainkan pada etika deliberatif yang mengakui keterbatasan individu dan pentingnya kebijaksanaan bersama (Fitriyanto, 2025). Rujukan kepada praktik Rasul yang tetap bermusyawarah meskipun memiliki keunggulan intelektual memperkuat argumen bahwa adab mengandung kerendahan hati epistemik. Temuan ini relevan untuk membedakan adab dari feodalisme, karena musyawarah mengandaikan partisipasi dan keterbukaan terhadap koreksi, bukan dominasi yang menutup ruang dialog.

Analisis teks juga menunjukkan bahwa adab mencakup disiplin diri dan keteguhan belajar sebagai etika proses. Pernyataan **"واعلم أن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور"** menegaskan kesabaran dan ketetapan sebagai prinsip besar dalam pendidikan. Makna normatifnya terlihat pada anjuran untuk menetap pada satu guru dan satu kitab hingga tuntas, serta larangan berpindah tanpa kebutuhan mendesak (Halstead, 2004). Disiplin ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan intelektual, melainkan untuk membangun kedalaman pemahaman dan konsistensi belajar. Temuan ini menunjukkan bahwa adab berfungsi sebagai etika pembentukan kapasitas akademik melalui ketekunan dan pengelolaan waktu, sehingga pendidikan dipahami sebagai proses jangka panjang yang menuntut kesungguhan (Saihu, 2020 ; Setiawan, 2014).

Dimensi sosial adab teridentifikasi melalui fasal memilih teman. Kutipan **"وأما اختيار الشريك"** mengarahkan murid untuk memilih lingkungan pergaulan yang rajin, jujur, dan wara', serta menjauhi teman yang malas dan merusak (Az-Zarnuji, 2009). Makna normatifnya menunjukkan bahwa adab tidak bersifat individualistik, melainkan memperhitungkan pengaruh habitus sosial terhadap pembentukan karakter ilmiah. Lingkungan belajar diposisikan sebagai faktor penentu kualitas pendidikan, sehingga adab berfungsi sebagai mekanisme protektif terhadap kultur anti-intelektual. Temuan ini menguatkan pemahaman tentang pesantren sebagai ruang pembentukan habitus yang ditopang oleh kedekatan sosial dan kontrol moral komunitas (Hafidzah, 2014).

Puncak penegasan adab sebagai etika pedagogis tampak dalam pernyataan **"اعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله"**. Kutipan ini menegaskan bahwa pemuliaan ilmu dan ahlinya merupakan syarat kemanfaatan ilmu. Makna normatifnya tidak dapat direduksi sebagai legitimasi kekuasaan guru, melainkan sebagai perlindungan terhadap martabat proses belajar. Ungkapan simbolik yang dinisbatkan kepada Ali tentang "menjadi budak bagi orang yang mengajarkan satu huruf" dapat dipahami sebagai hiperbola moral untuk menanamkan kerendahan hati akademik, bukan sebagai pembenaran subordinasi intelektual. Temuan ini menegaskan bahwa adab dalam *Ta'lim al-Muta'allim* berfungsi menjaga integritas ilmu, bukan mengukuhkan relasi dominatif (Nisa'u, 2025).

Secara keseluruhan hasil analisis teks normatif menunjukkan bahwa adab dalam *Ta'lim al-Muta'allim* merupakan etika pedagogis yang menata tujuan belajar, rasionalitas berbasis dalil, relasi etis guru dan murid, disiplin diri, dan lingkungan sosial pendidikan. Unsur-unsur reflektif seperti penolakan taklid buta, anjuran musyawarah, dan seleksi guru berbasis kualitas menegaskan bahwa adab tidak meniadakan daya kritis murid. Hasil dari telaah ini menguatkan kesimpulan bahwa adab dalam teks al-Zarnūjī lebih tepat dipahami sebagai mekanisme etis yang menjaga keadilan dan kebermaknaan pendidikan, bukan sebagai legitimasi feodalisme atau penundukan intelektual.

2. Feodalisme Simbolik dalam Praktik Pendidikan Pesantren

Kajian sosiologis terhadap pendidikan pesantren menunjukkan bahwa relasi kyai santri tidak hanya beroperasi dalam kerangka pedagogis, tetapi juga terstruktur oleh sistem makna, simbol, dan kekuasaan yang membentuk hierarki sosial internal pesantren. Pesantren sebagai institusi pendidikan tradisional memiliki kekhasan berupa kepemimpinan kyai yang diakui secara luas, baik sebagai pendidik, pemimpin moral, maupun figur sentral dalam kehidupan sosial-keagamaan komunitas sekitarnya. Otoritas tersebut tidak dibangun melalui mekanisme birokrasi formal, melainkan melalui pengakuan simbolik yang dilegitimasi oleh ilmu agama, karisma personal, dan jaringan tradisi keilmuan. Struktur ini dalam banyak kasus berfungsi efektif menjaga keberlanjutan tradisi dan stabilitas pendidikan, tetapi pada kondisi tertentu juga membuka ruang bagi munculnya relasi kuasa yang bersifat feodal secara simbolik (Sari, 2025).

Konsep feodalisme simbolik dalam konteks pesantren merujuk pada pola relasi sosial yang menempatkan kyai sebagai pusat otoritas yang sulit digugat, sementara santri

berada dalam posisi subordinat yang dituntut patuh secara total. Kepatuhan ini tidak selalu dipaksakan melalui kekerasan atau sanksi formal, melainkan direproduksi melalui simbol religius, bahasa adab, dan mekanisme internalisasi nilai (Wahyuni, 2025). Perspektif Pierre Bourdieu mengenai dominasi simbolik membantu menjelaskan bagaimana kekuasaan dapat bekerja secara halus dan diterima sebagai sesuatu yang wajar, bahkan bermoral. Dalam pesantren, kepatuhan santri sering dipersepsikan sebagai bentuk kesalehan dan adab, sehingga relasi yang timpang secara pedagogis dapat diterima tanpa resistensi terbuka (Bourdieu, 1990).

Otoritas kyai dalam pesantren juga dapat dipahami melalui konsep otoritas karismatik Max Weber, yaitu bentuk legitimasi kekuasaan yang bertumpu pada kepercayaan terhadap kualitas luar biasa seorang pemimpin. Karisma kyai dibangun melalui penguasaan kitab klasik, reputasi kesalehan, silsilah keilmuan, dan pengabdian sosial yang panjang. Karisma tersebut menghasilkan loyalitas personal santri yang kuat dan sering kali melampaui hubungan pedagogis rasional. Ketika otoritas karismatik tidak diimbangi dengan mekanisme reflektif dan etika pedagogis, relasi pendidikan berpotensi berubah menjadi hubungan patron klien yang paternalistik (Noviani, 2024).

Struktur paternalistik dalam pesantren ditandai oleh pengambilan keputusan yang terpusat pada kyai, minimnya partisipasi santri dalam proses deliberatif, serta pembatasan ruang kritik atas nama penghormatan dan adab. Literatur menunjukkan bahwa dalam banyak pesantren, santri tidak didorong untuk mengajukan pertanyaan kritis terhadap pandangan kyai, terutama dalam isu-isu non-teknis yang menyentuh otoritas moral dan kebijakan pesantren. Situasi ini menciptakan kultur pedagogis yang menekankan kepatuhan dan reproduksi pengetahuan, bukan dialog dan refleksi kritis. Pola tersebut sering kali dipersepsikan sebagai tradisi yang harus dijaga, meskipun secara pedagogis berpotensi membatasi perkembangan nalar kritis santri (Sari, 2025 ; Yasin, 2022).

Analisis sosiologi pendidikan kritis menunjukkan bahwa pembatasan kritik dalam pendidikan tidak selalu lahir dari niat represif, tetapi dari struktur simbolik yang mengaitkan kritik dengan ketidaksopanan, pembangkangan, atau bahkan kerusakan moral. Dalam pesantren, konsep adab kerap digunakan sebagai justifikasi normatif untuk meneguhkan kepatuhan santri terhadap kyai. Ketika adab direduksi menjadi ketaatan mutlak tanpa ruang dialog, adab kehilangan fungsi etisnya dan beralih menjadi alat legitimasi kekuasaan. Kondisi ini mencerminkan apa yang oleh Paulo Freire disebut sebagai *banking model of education*, yakni pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai objek pasif penerima pengetahuan, sementara pendidik menjadi subjek tunggal yang menentukan kebenaran (Ihejirika, 2017).

Pendekatan Freire menegaskan bahwa pendidikan yang membebaskan harus membuka ruang dialog, refleksi kritis, dan kesadaran struktural (*conscientization*). Dalam konteks pesantren, absennya dialog pedagogis yang setara berpotensi menghambat proses pembentukan subjek yang reflektif dan bertanggung jawab. Santri yang dibiasakan menerima tanpa mempertanyakan berisiko mengalami apa yang disebut Freire sebagai internalisasi penindasan, yakni penerimaan terhadap struktur yang membatasi dirinya sebagai

sesuatu yang wajar dan bahkan bernilai religius (Sulaeman, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa feodalisme simbolik dalam pesantren merupakan persoalan pedagogis dan sosiologis, bukan konsekuensi langsung dari ajaran Islam.

Perspektif Michel Foucault memperkaya analisis dengan menunjukkan bahwa kekuasaan dalam pendidikan tidak hanya bekerja melalui larangan dan hukuman, tetapi juga melalui produksi wacana, normalisasi, dan disiplin tubuh. Dalam pesantren, praktik disiplin harian, aturan kepatuhan, dan ritual penghormatan membentuk tubuh santri agar patuh dan teratur. Kekuasaan kyai beroperasi melalui pengetahuan agama yang dianggap sahih, sehingga santri menginternalisasi norma kepatuhan sebagai bagian dari pembentukan diri. Relasi kuasa semacam ini bersifat produktif sekaligus problematik, karena menghasilkan subjek yang taat tetapi berpotensi kurang kritis terhadap struktur yang membentuknya (Mustofa, 2017).

Literatur empiris juga menunjukkan variasi praktik pesantren dalam merespons modernitas dan tuntutan pendidikan kritis (Isbah, 2020). Sejumlah pesantren mulai mengadopsi model kepemimpinan kolektif (Azman, 2024), forum musyawarah santri, dan kurikulum yang mendorong diskusi terbuka (Helmi, 2023). Namun, pesantren yang mempertahankan struktur otoritas tunggal cenderung lebih rentan mereproduksi feodalisme simbolik, terutama ketika legitimasi kyai diperkuat oleh status ekonomi, politik lokal, dan jaringan kekuasaan eksternal (Hefner, 2009). Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa feodalisme simbolik tidak bersumber dari teks normatif, melainkan dari konfigurasi sosial, sejarah, dan institusional pesantren.

Praktik pesantren perlu dipahami melalui pembedaan konseptual antara adab sebagai nilai etis dan feodalisme sebagai struktur sosial. Adab dalam tradisi Islam berfungsi menjaga martabat ilmu serta membangun relasi pendidikan yang bermoral. Feodalisme simbolik muncul ketika nilai tersebut terlepas dari prinsip keadilan pedagogis dan rasionalitas, sehingga relasi pendidikan berpotensi berubah menjadi relasi kuasa yang timpang. Kerangka analisis ini menunjukkan bahwa kritik terhadap feodalisme pesantren tidak dimaksudkan sebagai penolakan terhadap tradisi pesantren, melainkan sebagai upaya reflektif untuk memulihkan fungsi pendidikan sebagai ruang pembentukan manusia yang berilmu, beradab, dan kritis. Pemisahan yang tegas antara teks normatif dan praktik sosial menjadi penting agar kritik tidak terjebak dalam simplifikasi maupun delegitimasi terhadap ajaran Islam klasik (Ahmad, 2021).

Keseluruhan temuan literatur menunjukkan bahwa feodalisme simbolik dalam pesantren merupakan fenomena sosiologis yang lahir dari interaksi antara otoritas karismatik, struktur paternalistik, dan mekanisme dominasi simbolik. Relasi kuasa yang tidak etis secara pedagogis dapat bertahan karena dibungkus oleh bahasa adab dan legitimasi religius. Analisis kritis berbasis teori Freire dan Foucault menegaskan bahwa pendidikan yang berorientasi pada pembentukan insan beradab harus membuka ruang dialog, refleksi, dan tanggung jawab bersama. Posisi ini menegaskan bahwa problem feodalisme pesantren terletak pada praktik dan struktur sosial, bukan pada teks klasik atau nilai etika pendidikan Islam itu sendiri.

3. Distorsi Pemaknaan Adab Antara Teks dan Praksis

Pemaknaan adab dalam tradisi pendidikan Islam menempati posisi epistemologis yang sangat mendasar, sebagaimana dirumuskan secara eksplisit dalam Kitab *Ta'līm al-Muta'allim*. Al-Zarnuji tidak memandang adab sebagai unsur tambahan atau pelengkap pembelajaran, melainkan sebagai syarat utama bagi lahirnya ilmu yang bermakna dan membawa keberkahan. Pernyataan normatif yang sangat tegas menyebutkan:

أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَا يَنَالُ الْعِلْمَ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا بِتَعْظِيمِ الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ وَتَعْظِيمِ الْأُسْتَاذِ

"*Sesungguhnya penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaatnya kecuali dengan memuliakan ilmu, para ahlinya, dan memuliakan guru"*

Rumusan ini menunjukkan bahwa adab dimaksudkan sebagai kesadaran etis yang mengarahkan niat, metode, dan relasi pedagogis agar proses pencarian ilmu berjalan secara bermartabat dan bertanggung jawab (Samdani, 2021 ; Rachmah, 2020). Konstruksi adab dalam teks tersebut menekankan dimensi batiniah dan moral, bukan sekadar kepatuhan formal. Al-Zarnuji menegaskan bahwa keberhasilan dalam menuntut ilmu berkaitan erat dengan kemampuan penuntut ilmu menjaga penghormatan, kerendahan hati, dan pengendalian ego. Pernyataan bahwa "seseorang akan jatuh dari kedudukannya karena meremehkan adab" bukanlah ancaman sosial, melainkan peringatan etis bahwa ilmu kehilangan orientasi ketika kesombongan dan pengabaian nilai moral mendominasi proses belajar . Dengan demikian, adab berfungsi sebagai perangkat internal yang membentuk integritas pribadi penuntut ilmu, bukan sebagai alat eksternal untuk menundukkan atau membungkam murid.

Praktik pendidikan pesantren kontemporer menunjukkan adanya penyempitan makna adab yang signifikan. Adab sering dipahami secara reduktif sebagai kepatuhan mutlak kepada figur kiai atau ustadz, terlepas dari konteks pedagogis dan tujuan etisnya. Sejumlah penelitian mencatat bahwa simbol-simbol ta'dzim seperti sikap tunduk total, pembatasan ruang bertanya, dan larangan mengemukakan pandangan kritis diperlakukan sebagai indikator utama keberadaban santri (Wibowo, 2020 ; Syaehotin, 2020). Reduksi ini menggeser adab dari kerangka etis-intelektual menuju mekanisme kontrol sosial yang mengatur perilaku santri secara sepihak dan hierarkis.

Distorsi pemaknaan tersebut semakin menguat melalui pembacaan literal terhadap ungkapan simbolik dalam *Ta'līm al-Muta'allim*. Ungkapan Sayyidina Ali yang sangat populer sering dijadikan legitimasi kepatuhan absolut:

أَنَا عَبْدٌ لِمَنْ عَلَّمَنِي حَرْفًا وَاحِدً

"*Aku adalah hamba bagi orang yang mengajarkanku satu huruf*"

Dalam konteks teks, ungkapan ini mencerminkan sikap kerendahan hati dan pengakuan moral atas jasa intelektual guru. Namun dalam praktik pesantren, ungkapan tersebut kerap dipahami secara normatif sebagai justifikasi relasi subordinatif yang meniadakan posisi santri sebagai subjek pembelajar yang memiliki akal dan tanggung jawab intelektual (Elpina, 2022).

Lembagaisasi ta'dzim sebagai norma kultural mempercepat transformasi adab menjadi relasi patronase dan paternalisme religius. Penelitian tentang hubungan kiai dan santri menunjukkan bahwa penghormatan yang semula bersifat etis sering berkembang menjadi loyalitas hierarkis yang tidak dapat dipersoalkan (Siswanto, 2018 ; Karim, 2025). Dalam pola ini, otoritas kiai meluas dari wilayah pedagogis ke ranah simbolik dan sosial, sehingga setiap bentuk kritik atau perbedaan pendapat mudah diberi label sebagai pelanggaran adab. Adab dalam konteks ini kehilangan fungsi etiknya dan berubah menjadi instrumen legitimasi kekuasaan yang bercorak feodal.

Pembacaan menyeluruh terhadap *Ta'līm al-Muta'allim* menunjukkan bahwa distorsi tersebut justru bertentangan dengan spirit teks. Al-Zarnuji secara tegas membatasi ruang ketaatan kepada guru. Pernyataan penting yang sering diabaikan menyebutkan:

وَأَنْ يُطِيعَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"*Seorang murid hendaknya menaati gurunya selama tidak dalam maksiat kepada Allah, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Pencipta*"

Batas etik ini menegaskan bahwa adab tidak pernah dimaksudkan sebagai kepatuhan tanpa nalar, melainkan sebagai relasi moral yang tunduk pada prinsip ketuhanan dan keadilan.

Distorsi adab juga diproduksi melalui praktik *hidden curriculum* yang bekerja secara tidak disadari dalam kehidupan pesantren. Nilai kepatuhan, hierarki, dan subordinasi ditanamkan melalui kebiasaan sehari-hari, cerita keteladanan, serta aturan tak tertulis yang jarang dikaji secara kritis (Ulum, 2023). Proses ini membentuk habitus santri untuk menerima relasi kuasa sebagai sesuatu yang alamiah dan tidak perlu dipertanyakan. Padahal, teks *Ta'līm al-Muta'allim* menekankan pembersihan akhlak tercela seperti kesombongan dan keangkuhan sebagai inti adab, bukan penguatan struktur hierarkis yang meniadakan kesadaran kritis.

Implikasi distorsi pemaknaan adab terlihat jelas pada melemahnya fungsi kritis pendidikan Islam. Pendidikan yang seharusnya membentuk insan berilmu dan berakhlak berpotensi mereproduksi ketimpangan relasi kuasa ketika adab dipahami secara normatif tanpa reinterpretasi kontekstual (Zaman, 2023). Santri yang dibesarkan dalam kultur kepatuhan absolut sering mengalami kesulitan mengembangkan kemandirian berpikir, keberanian intelektual, dan tanggung jawab sosial setelah keluar dari pesantren.

Fenomena su'ul adab yang dilekatkan pada santri kontemporer perlu dibaca sebagai gejala struktural, bukan semata kegagalan moral individual. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perilaku yang dilabeli sebagai krisis adab sering merupakan respons terhadap sistem pendidikan yang represif dan menutup ruang dialog (Sari, 2024). Ketegangan antara santri dan otoritas pesantren dalam konteks ini merefleksikan konflik antara tuntutan kepatuhan struktural dan kebutuhan pengakuan sebagai subjek pendidikan yang bermartabat.

Rekonstruksi pemaknaan adab menjadi kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara teks normatif *Ta'līm al-Muta'allim* dan praksis

pendidikan pesantren kontemporer. Adab perlu dipahami kembali sebagai etika relasional yang memadukan penghormatan, rasionalitas, dan tanggung jawab moral. Pembacaan kritis terhadap teks menunjukkan bahwa adab tidak pernah dimaksudkan untuk membungkam nalar, melainkan untuk membentuk insan berilmu yang rendah hati, merdeka secara intelektual, dan berintegritas etis (Rohanita, 2025). Reinterpretasi inilah yang membuka jalan bagi transformasi pendidikan pesantren menuju praksis yang lebih humanis, dialogis, dan berkeadilan.

4. Reinterpretasi Adab sebagai Etika Emansipatoris Pendidikan Pesantren

Reinterpretasi adab dalam pendidikan pesantren merupakan kebutuhan konseptual dan praksis yang tidak dapat ditunda terutama di tengah ketegangan yang semakin nyata antara norma ideal yang termaktub dalam teks-teks klasik dan realitas pedagogis pesantren kontemporer. Kitab *Ta'lim al-Muta'allim* secara eksplisit menempatkan adab sebagai fondasi etis pencarian ilmu, yang berfungsi menjaga kemurnian niat, ketertiban proses belajar, serta kehormatan relasi guru dan murid (Mariati, 2025). Namun dalam praktik kelembagaan, adab kerap direduksi menjadi seperangkat aturan kepatuhan hierarkis yang kaku dan simbolik sehingga menjauh dari tujuan etik-intelektual yang dikandungnya. Reduksi ini menjadikan adab tidak lagi bekerja sebagai etika pembebasan akal, melainkan sebagai instrumen kontrol sosial yang membatasi ekspresi kritis santri (Azim, 2023).

Fenomena pergeseran fungsi adab dalam pendidikan pesantren dapat dipahami melalui kajian tentang relasi otoritas dan praktik pedagogis di pesantren Indonesia. Martin van Bruinessen menunjukkan bahwa dalam banyak pesantren, otoritas keilmuan dan moral kyai dilembagakan secara kuat melalui simbol, tata tertib, dan tradisi kepatuhan santri, sehingga relasi pendidikan cenderung bersifat hierarkis dan menempatkan santri sebagai subjek yang harus tunduk pada struktur otoritas yang mapan. Dalam konteks ini, nilai-nilai etis seperti adab kerap dipraktikkan sebagai kepatuhan simbolik terhadap figur otoritas, bukan sebagai kesadaran moral yang tumbuh melalui refleksi dan dialog intelektual (Van Bruinessen, 1994). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ronald A. Lukens-Bull yang mengkaji praktik pendidikan pesantren dan menunjukkan bahwa penekanan berlebihan pada disiplin, ketaatan, dan stabilitas tradisi dapat membatasi ruang kritik dan diskursus rasional di kalangan santri. Lukens-Bull mencatat bahwa meskipun pesantren memiliki tradisi keilmuan yang kuat, budaya akademik kritis sering kali berkembang secara terbatas karena adanya kekhawatiran melanggar adab atau dianggap tidak sopan terhadap otoritas guru. Kedua kajian ini mengindikasikan bahwa tanpa reinterpretasi adab secara reflektif dan dialogis, adab berpotensi kehilangan fungsi transformatifnya dan beroperasi terutama sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan pedagogis (Lukens-Bull, 2000).

Dalam kerangka pendidikan Islam, adab sejatinya tidak pernah dimaksudkan sebagai instrumen penundukan intelektual. Tradisi keilmuan Islam klasik menempatkan adab sebagai prasyarat etis agar akal bekerja secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kebenaran. Konsep *ta'dib* dalam pendidikan Islam menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan bukan sekadar transmisi pengetahuan, melainkan pembentukan

manusia beradab yang mampu menempatkan ilmu, akal, dan moral secara proporsional (Fadillah, 2023). Dalam pengertian ini, adab bukanlah antitesis rasionalitas, tetapi fondasi etik yang mengarahkan nalar agar tidak terlepas dari tanggung jawab moral dan spiritual.

Pemaknaan adab sebagai kerangka etis rasionalitas membuka ruang bagi reinterpretasi adab dalam konteks pendidikan pesantren kontemporer. Reinterpretasi ini menuntut perubahan paradigma relasi pedagogis, dari model pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai objek kepatuhan menuju pendidikan yang memandang santri sebagai subjek moral dan intelektual yang aktif. Dalam pendidikan emansipatoris, santri dipahami memiliki kapasitas berpikir, berdialog, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya (Al-Attas, 1980). Dalam kerangka ini, adab berfungsi sebagai etika diskursus yang mengatur cara bertanya, berdebat, dan berbeda pendapat secara bermartabat, bukan sebagai mekanisme pembungkaman kritik.

Secara historis dan kultural, pesantren memiliki potensi besar untuk mengembangkan pendidikan dialogis berbasis tradisi keilmuan Islam. Praktik musyawarah, *bahtsul masail*, dan kajian kitab merupakan bentuk konkret dari tradisi intelektual yang membuka ruang argumentasi rasional dalam batas etika. Kajian etnografis tentang pesantren menunjukkan bahwa praktik diskursus ini telah lama menjadi bagian dari dinamika pendidikan pesantren, meskipun dalam praktik tertentu ruang dialog dapat mengalami pembatasan akibat penguatan struktur otoritas (Lukens-Bull, 2000). Oleh karena itu, adab yang dipahami secara reflektif memungkinkan tradisi keilmuan pesantren berkembang tanpa kehilangan kerangka etiknya.

Reposisi adab sebagai etika emansipatoris berdampak langsung pada peran kyai dalam struktur pedagogis pesantren. Otoritas kyai dalam tradisi pesantren tidak semata-mata bersumber dari struktur hierarkis, melainkan dari penguasaan ilmu, integritas moral, dan pengakuan sosial dari komunitas pesantren (Van Bruinessen, 1994). Dalam relasi pedagogis yang dialogis, kyai berperan sebagai *murabbi* yang membimbing perkembangan intelektual dan moral santri melalui keteladanan dan komunikasi dua arah. Model kepemimpinan semacam ini justru memperkuat legitimasi moral pesantren karena otoritas dibangun atas dasar keilmuan dan keteladanan, bukan paksaan simbolik.

Dalam paradigma ini, santri diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memiliki kapasitas berpikir kritis sekaligus tanggung jawab moral. Budaya akademik pesantren yang membuka ruang diskusi, musyawarah, dan kritik argumentatif memungkinkan santri mengembangkan kemampuan analitis tanpa menghilangkan nilai penghormatan terhadap guru. Penghormatan dipahami sebagai sikap etis yang berjalan seiring dengan keberanian menyampaikan argumen secara rasional dan bertanggung jawab. Internalisasi adab dalam konteks ini berlangsung melalui keterlibatan aktif santri dalam proses pembelajaran yang reflektif, bukan melalui kepatuhan pasif. Implikasi reinterpretasi adab juga menyentuh ranah kelembagaan pesantren. Pada level institusional, adab perlu dipahami sebagai prinsip etik yang mengatur tata kelola pendidikan, termasuk dalam pengambilan keputusan, evaluasi, dan partisipasi warga pesantren. Etika

pendidikan Islam menempatkan keadilan, tanggung jawab moral, dan pembatasan kekuasaan sebagai prinsip fundamental dalam pengelolaan lembaga pendidikan (An-Na'im, 2008). Dengan demikian, adab berfungsi sebagai etika kelembagaan yang mencegah penyalahgunaan otoritas dan menjaga integritas moral pesantren. Lebih jauh, reinterpretasi adab berperan sebagai mekanisme pencegah feodalisme dan kekerasan simbolik dalam pendidikan pesantren. Ketika adab direduksi menjadi kepatuhan absolut, ia berpotensi melegitimasi relasi kuasa yang timpang dan menormalisasi ketidakadilan pedagogis. Sebaliknya, adab yang dimaknai secara reflektif dan dialogis membatasi otoritas agar tetap berada dalam koridor etika dan keadilan. Pendidikan Islam yang berorientasi pada etika dialog menempatkan komunikasi setara dan tanggung jawab moral sebagai prasyarat pembelajaran yang bermakna (Ramadan, 2009).

Pada akhirnya reinterpretasi adab sebagai etika emansipatoris merupakan bentuk *tajdid* pedagogis yang berakar kuat pada tradisi Islam klasik sekaligus responsif terhadap tantangan pendidikan kontemporer. Dengan memaknai adab sebagai etika pembelajaran yang memadukan penghormatan, kebebasan berpikir, dan tanggung jawab moral, pesantren memiliki peluang besar untuk mempertahankan otoritas moralnya sekaligus mengembangkan tradisi keilmuan yang kritis, dialogis, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa konsep adab dalam Kitab *Ta'lim al-Muta'allim* merupakan etika pedagogis yang berfungsi mengarahkan orientasi belajar, membangun tanggung jawab intelektual, serta menata relasi etis antara guru dan murid. Adab tidak dimaksudkan sebagai legitimasi kepatuhan absolut atau penundukan intelektual, melainkan sebagai kerangka moral yang menjaga kebermaknaan ilmu dan integritas proses pendidikan.

Fenomena feodalisme dalam pendidikan pesantren tidak bersumber dari ajaran normatif Islam, melainkan dari praktik sosial dan struktur otoritas yang berkembang dalam konteks historis dan kelembagaan tertentu. Distorsi pemaknaan adab terjadi ketika nilai etis tersebut direduksi menjadi mekanisme kontrol simbolik yang membatasi dialog dan nalar kritis santri. Reinterpretasi adab sebagai etika emansipatoris menjadi kebutuhan mendesak untuk memulihkan fungsi pendidikan pesantren sebagai ruang pembentukan insan beradab, kritis, dan bertanggung jawab secara moral. Reinterpretasi ini memungkinkan pesantren mempertahankan otoritas moralnya tanpa terjebak dalam relasi pedagogis yang feodal dan tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

Afriyal, A., Setyani, A. D., Azis, I. M., & Irawan, G. A. (2025). Strategi pedagogis dalam pembelajaran kitab *Nailur Roja Syarah Safinatun Najah* pada bab nikah di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta.

Ahmad, A. (2021). Konsep ta'dib Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan implikasinya dalam pendidikan Islam. *An Nur: Jurnal Studi Islam, 13*(1), 32–50.

Akbar, F. M. A. (2024). Metode kualitatif dan kuantitatif pada studi Islam. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies, 2*(2), 95–112.

Al-Ainiyah, N., & Muhid, A. (2025). The concept of social interaction in education: Perspectives from the kitab *Ta'lim Muta'allim*. *INCARE: International Journal of Educational Resources, 5*(5), 534–546.

Al-Attas, M. N. (1980). *The concept of education in Islam* (pp. 19–33). Muslim Youth Movement of Malaysia.

Al-Attas, S. M. N. (1991). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education*.

Alfaris, R., Nurrahman, D., Farid, A., Rahmadani, A., & Musi, S. (2025). Problematika tayangan Trans7 dalam feodalisme di pesantren. *Journal of Citizenship, 4*(1).

An-Na'im, A. A. (2010). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Sharia*. Harvard University Press.

Ashimulloh, A., & Maula, N. A. I. (2025). Kritik terhadap fenomena anggapan feodalisme di pesantren: Analisis penafsiran Surah Luqmān ayat 14. Dalam *Prosiding AnSoPS (Annual Symposium on Pesantren Studies)* (Vol. 4, hlm. 15–27).

Azim, F., Chanifudin, C., & Ritonga, S. (2023). Modernisasi pendidikan Islam perspektif Azyumardi Azra dalam buku *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. *JIPKIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman, 3*, 255–260.

Azman, Z., Supriadi, S., & Arikarani, Y. (2024). Reformulation of Islamic educational leadership in the era of disruption. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman, 22*(2), 221–239.

Az-Zarnuji, B. al-D. (2009). *Terjemah Ta'lim Muta'allim* (A. K. Aljufri, Trans.; H. Abdullah & I. Hasan, Eds.). Mutiara Ilmu.

Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1990). *Reproduction in education, society and culture*. Sage.

Darmawan, T. Y., Nasution, M. A. Q. B., & Ihsan, M. F. (2025). Alat pendidikan Islam dalam perspektif kontemporer: Analisis literatur dan implikasinya. *Journal of Sustainable Education, 2*(2), 192–199.

Dhofier, Z. (1980). *The pesantren tradition: A study of the role of the kyai in the maintenance of the traditional ideology of Islam in Java*. The Australian National University.

Elpina, E. (2022). *Etika guru dalam perspektif kitab Adabul 'Alim wal Muta'allim dan relevansinya dengan kode etik guru di Indonesia* (Disertasi doktoral). Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & al-Lakhm, N. R. R. (2023). The concept of science in Islamic tradition: Analytical studies of Syed Naquib Al-Attas on knowledge. *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 7*(1), 25–62.

Fitriyanto, A., & Mintarsih, A. S. (2025). Adab peserta didik dalam kitab *Ta'limul Muta'allim*: Perspektif filsafat pendidikan Islam. *Journal of Research and Thought on Islamic Education, 8*(2), 201–227.

Fitriyanto, A., Hermansyah, & Mintarsih, A. S. (2025). Adab peserta didik terhadap pendidik dalam kitab *Ta'līm al-Muta'allim*: Kajian aksiologis Ibn Miskawayh. *Journal of Research and Thought on Islamic Education, 8*(2), 201–227.

Hafidzah, L. (2014). Textbooks of Islamic education in Indonesia's traditional pesantren. *Al-Albab: Borneo Journal of Religious Studies, 3*(2), 199–212.

Halstead, M. (2004). An Islamic concept of education. *Comparative Education, 40*(4), 517–529.

Hefner, R. W. (2009). Islamic schools, social movements, and democracy in Indonesia. Dalam *Making modern Muslims* (hlm. 55–105).

Helmi, A. M., & Hanifuddin, H. (2023). Kontribusi kegiatan Bahtsul Masail dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis santri. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 4*(2), 2401–2412.

Ihejirika, I. C. (2017). A constructivist appraisal of Paulo Freire's critique of banking system of education. *European Journal of Educational and Development Psychology, 6*(1), 1–13.

Isbah, M. F. (2020). Pesantren in the changing Indonesian context. *Qudus International Journal of Islamic Studies, 8*(1), 65–106.

Jamil, N. A., Masyhuri, M., & Ifadah, N. (2023). Perspektif sejarah sosial dan nilai edukatif pesantren. *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies, 3*(2), 197–221.

Karim, M. L., & Ashoumi, H. (2025). Kepemimpinan religio-paternalistik kiai. *JoEMS: Journal of Education and Management Studies, 8*(1), 13–17.

Lukens-Bull, R. A. (2000). Teaching morality: Javanese Islamic education in a globalizing era. *Journal of Arabic and Islamic Studies, 3*, 26–47.

Manan, A., & Saifudin, M. (2025). Implementasi pembelajaran kitab *Ta'lim Muta'allim*. *Jurnal Keislaman, 8*(2), 353–372.

Mariati, M., & Walidin, W. (2025). Pembelajaran perspektif Al-Zarnuji. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, 7*(2), 95–114.

Mukhlis, M. (2023). Komponen utama kurikulum pendidikan Islam di pesantren. *Al-Ma'had: Jurnal Ilmiah Kepesantrenan, 1*(2), 138–158.

Mustofa, M. (2017). Analisis disiplin dan kuasa tubuh Michel Foucault. *Jurnal Yaqzhan, 3*(1).

Nisa'u, F. I., & Karsidi, R. (2025). Symbolic power and discursive construction of obedience. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, 10*(1), 328–341.

Noviani, D., & Azkar, M. (2024). Student disciplinary practices in a boarding school environment. *Tafkir, 5*(3), 391–399.

Rachmah, I. E., Saifuddin, S., Ramli, M., & Pratama, E. (2020). Implementasi kitab *Ta'lim Muta'allim*. *ADDABANA, 3*(2), 101–109.

Ramadan, T. (2009). *Radical reform: Islamic ethics and liberation*. Oxford University Press.

Rohanita, L., et al. (2025). Representasi feodalisme pesantren dalam media televisi. *YASIN, 5*(6), 6455–6478.

Saihu, S. (2020). Etika menuntut ilmu menurut kitab *Ta'lim Muta'alim*. *Al Amin, 3*(1), 99–112.

Samdani, S., & Lellya, I. (2021). Konsep *Ta'lim al-Muta'allim* dalam kultur adab perguruan tinggi Islam. *Khazanah, 19*(1), 127–144.

Sari, I. T. N., & Darnoto, D. (2024). Fenomena su'ul adab pada santri pesantren. *Innovative, 4*(5), 2917–2926.

Sari, R. T., Madani, C., Afradini, A. R., Uyun, Q., & Chanigia, G. A. (2025). Otoritas dan feodalisme dalam tradisi pesantren Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3*(4), 207–218.

Setiawan, A. (2014). Prinsip pendidikan karakter dalam Islam. *Dinamika Ilmu, 14*(1), 1–12.

Siswanto, I., & Yulita, E. (2018). Eksistensi pesantren dengan budaya patronase. *Mitra Ash-Shibyan, 2*(1), 87–107.

Sodiman, S. (2013). Etos belajar dalam kitab *Ta'liim al-Muta'allim*. *Al-Ta'dib*, 56–72.

Sulaeman, E. (2025). Implementasi pemikiran filosofis Paulo Freire dalam dunia pendidikan. *Ta'lim, 4*(2).

Syaehotin, S., & Atho', A. Y. (2020). Tadzim santri kepada kiai. *Al Qodiri, 18*(1), 240–248.

Ulum, B., & Riswadi, R. (2023). Exploring the role of teachers in the development of hidden curriculum. *Al-Wijdān, 8*(2), 261–279.

Van Bruinessen, M. M. (1994). *Pesantren and kitab kuning: Continuity and change in a tradition of religious learning*.

Wahid, A. U., & Ali, R. S. (2025). Pesantren dan feodalisme. *Jurnal Keilmuan dan Keislaman*, 622–654.

Wahyuni, E. S. (2025). Between feudalism and Islamic boarding school manners. *International Journal of Islamic Studies Issues, 1*(2), 10–16.

Wibowo, H. (2020). Etika santri kepada kiai menurut kitab *Ta'lim Muta'allim*. *Panangkaran, 4*(2), 1–12.

Winarno, E. P., Islah, I., Giyoto, G., Suharto, T., & Muharom, F. (2025). Investigasi pendidikan Islam terhadap kuasa otoritas kekerasan seksual di pesantren. *Al Qalam, 19*(2), 958–972.

Yasin, M., & Khasbulloh, M. N. (2022). Constructing ethical critical thinking at pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam, 8*(2), 127–144.

Zaman, A., Aftab, M. A., & Shahzad, M. (2023). Impact of hidden curriculum. *International Research Journal of Management and Social Sciences, 4*(4), 122–133